

**IMPLEMENTASI KEMITRAAN KEHUTANAN DI WILAYAH KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN RINJANI TIMUR**

**IMPLEMENTATION OF FORESTRY PARTNERSHIP IN THE AREA OF EAST
RINJANI FOREST MANAGEMENT UNIT**

Dila Kartika Dewi¹, Andi Chairil Ichsan¹, Budhy Setiawan¹
Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

*Email: dilakartika97@gmail.com

ABSTRACT

One of the government's policies to increase community participation in forest management is through forestry partnerships. The Puncak Semaring Forest Farmers Group Association is a combination of forest farmer groups in partnership with East Rinjani BKPH. The purpose of this research is to examine the implementation of the forestry partnership program between the Puncak Semaring Forest Farmers Group Association and the East Rinjani BKPH, to determine the supporting and inhibiting factors in the implementation of the forestry partnership program between the Puncak Semaring Forest Farmers Group Association and the East Rinjani BKPH, to formulate strategies in partnership management. forestry between the Puncak Semaring Forest Farmers Group Association and the East Rinjani BKPH. To measure the extent to which the implementation of the forestry partnership program refers to the principle of ostrom (1990). This research method uses a descriptive method with a qualitative-quantitative approach. Determination of respondents using purposive sampling and data collection using interviews. Focus Group Discussion, observation, and literature study. Identification of supporting and inhibiting factors as well as strategies for increasing institutional capacity of the Puncak Semaring Forest Farmers Association using SWOT analysis. Based on the research conducted, the average institutional assessment of the Joint Forestry Partnership Program of Puncak Semaring Forest Farmers Group is 29.11 points, indicating a high criterion. From the results of the SWOT analysis, it is found that the factors that become strengths include high public support and trust in the partnership program; involvement of stakeholders, and the occurrence of institutional strengthening. While the inhibiting factors for forestry partnerships include low human resources, lack of capital, and lack of counseling. The strategy used is S-O (Strength – Opportunities) by optimizing the partnership program in order to maintain and increase the potential of resources to be managed optimally.

Keywords: Forest Farmers Group, Forestry Partnership, BKPH

ABSTRAK

Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah melalui kemitraan kehutanan. Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak semaring merupakan gabungan kelompok tani hutan yang bermitra dengan BKPH Rinjani Timur. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Mengkaji pelaksanaan program kemitraan kehutanan antara Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring dengan BKPH Rinjani Timur, menentukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan program kemitraan kehutanan antara Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring dengan BKPH Rinjani Timur, merumuskan strategi dalam pengelolaan kemitraan kehutanan antara Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring dengan BKPH Rinjani Timur. Untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program kemitraan kehutanan mengacu pada prinsip Ostrom. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Penentuan responden menggunakan *purposive sampling* dan pengumpulan data menggunakan wawancara, *Focus Group Discussion* atau FGD, observasi, dan studi pustaka. Identifikasi faktor pendukung dan penghambat serta strategi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, rata-rata penilaian kelembagaan Program Kemitraan Kehutanan Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring adalah 29,11 poin, menunjukkan kriteria yang tinggi. Dari hasil analisis SWOT didapatkan faktor-faktor yang menjadi kekuatan antara lain dukungan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap program kemitraan, keterlibatan *stakeholders*, dan terjadinya penguatan kelembagaan. Sedangkan faktor penghambat kemitraan kehutanan antara lain SDM yang masih rendah, kurangnya modal, dan kurangnya penyuluhan. Dan strategi yang digunakan adalah S-O (*Strenght – Opportunities*) yaitu dengan mengoptimalkan program kemitraan guna mempertahankan dan meningkatkan potensi sumberdaya untuk dikelola dengan maksimal.

Kata kunci: Kelompok Tani Hutan, Kemitraan Kehutanan, BKPH

PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan secara lestari (*Sustainable Forest Management*) didasarkan atas tiga fungsi utama hutan yaitu fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. Salah satu tujuan pengelolaan hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada sekitar hutan (Wahanisa, 2015). Untuk menjamin kelestarian fungsi dan peran hutan, dapat ditempuh dengan strategi yang mencakup pelaksanaan pengelolaan hutan ke dalam kegiatan Kemitraan Kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.09 Tahun 2021.

Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring merupakan salah satu kelompok yang bermitra dengan BKPH Rinjani Timur yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, di kawasan Gunung Rinjani dan berbatasan langsung dengan hutan lindung. Berdasarkan kesepakatan kerjasama antara BKPH Rinjani Timur dengan Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring tahun 2016, hutan mitra yang disepakati adalah hutan lindung dengan luas 320 Ha. Berdasarkan data profil Gapoktan Hutan Puncak Semaring tahun 2015, terdapat 470 KK bekerja sebagai penggarap. Komoditi yang menjadi komoditas utama kemitraan antara BKPH Rinjani Timur dengan Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring adalah jenis tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), empon-empon dan jenis tanaman MPTS (*Multipurpose tree species*).

BKPH Rinjani Timur, sebagai unit pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Sejumlah kebijakan telah diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan memperbaiki kualitas sumberdaya hutan. Akan tetapi kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat desa hutan masih banyak ditemukan di pedesaan khususnya desa sekitar hutan (Kusdamayanti, 2008). Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghambat program kemitraan. Permasalahannya, informasi yang diterima masyarakat tentang program kemitraan masih sulit di terima sehingga menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang program kemitraan. Kurangnya pemahaman masyarakat disebabkan oleh minimnya pola pikir masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari para pemangku kepentingan.

Berdasarkan data penilaian dengan menggunakan metode *Participatory Poverty Assessment and Monitoring* (PPAM 2015), dilihat dari indeks kesejahteraan dasar (*basic needs*) jumlah penduduk miskin di Desa Mekar Sari adalah 949 KK (45%), 1141 KK (51%) termasuk dalam kelompok menengah dan 11 KK (1%) tergolong sejahtera. Berdasarkan data tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat sebagian besar masih kelas menengah dan miskin. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dalam program kemitraan ini yang seahrusnya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola kemitraan dengan KPH dan mungkin menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengkaji proses pelaksanaan program Kemitraan Kehutanan antara Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring dengan BKPH Rinjani Timur, (2) menentukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan program Kemitraan Kehutanan antara Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring dengan BKPH Rinjani Timur, (3) merumuskan strategi dalam pengelolaan Kemitraan Kehutanan antara Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring dengan BKPH Rinjani Timur.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2021 di Desa Mekar sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif, menurut (Abdurrahman, 2012) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif yang digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sebenarnya di lapangan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, *Focus Group Discussion* atau FGD, observasi, dan studi pustaka.

Penentuan responden dengan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu atau seleksi khusus oleh peneliti sendiri (Yusra, *et al.*, 2017). Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring yang memiliki jumlah total anggota kelompok yaitu 513. Batas eror yang digunakan pada penelitian ini adalah 15% karena batas eror 15% dianggap sudah cukup mewakili anggota kelompok tani (Utami dan Ratiningsih, 2018). Berdasarkan rumus Slovin, jumlah responden untuk penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah anggota kelompok tani

e = Batas eror (15%)

l = Bilangan konstan

jadi:

$$n = \frac{513}{513(0,15)^2 + 1}$$

$$n = \frac{513}{12,5}$$

$$n = 41$$

Jumlah sub anggota kelompok tani tidak sama sehingga untuk mendapatkan sampel dari masing-masing kelompok tani digunakan rumus (Noor, 2011 *cit* Utami dan Ratnaningsih, 2018). Jumlah sub anggota kelompok tani secara lengkap disajikan pada Tabel 1.

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan:

ni = Banyaknya sampel ke-i

n = Banyaknya sampel

N = Banyaknya anggota kelompok tani

Ni = Banyaknya anggota kelompok tani ke-i

Tabel 1. Jumlah Responden Masing-Masing Kelompok Tani Hutan

Nama KTH	Jumlah Anggota	Jumlah Responden
Batu bedai	69	6
Rindu alam	45	4
Tempos sodot	93	7
Batu kaoq	57	5
Mudung	91	7
Urat kelayu	87	7
Makmur	71	6
Jumlah	513	41

Untuk menilai proses pelaksanaan kemitraan kehutanan di desa Mekar Sari mengacu pada 8 prinsip Ostrom Massiri (2016) berikut:

1. Prinsip kejelasan batas-batas wilayah dengan indikator penilaian kejelasan wilayah lahan kemitraan
2. Prinsip kesesuaian dengan indikator penilaian kesesuaian distribusi biaya dan manfaat, kesesuaian aturan kemitraan dengan kondisi ekonomi masyarakat, kesesuaian aturan pemanfaatan sumberdaya dengan kebutuhan masyarakat
3. Prinsip pengaturan kolektif dengan indikator penilaian intensitas pertemuan, partisipasi masyarakat dalam setiap pertemuan
4. Prinsip monitoring dengan indikator penilaian proses monitoring dilakukan secara aktif oleh lembaga lokal dan proses monitoring dilakukan secara efektif oleh masyarakat setempat

5. Prinsip penerapan sanksi dengan indikator penilaian mekanisme sanksi dapat ditegakkan kepada pihak yang melanggar
6. Prinsip pengakuan hak dengan indikator penilaian hak masyarakat dalam program kemitraan mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah
7. Prinsip keterkaitan sistem pengelolaan dengan indikator penilaian kesesuaian aturan program kemitraan pada level operasional, kolektif, dan konstitusional

Kinerja kelembagaan dihitung dengan menggunakan model perhitungan skala Likert (Sugiyono, 2018) dengan level 1 sampai 3 dimana:

- 1 = Kurang jelas / Kurang Baik/Jarang/Tidak Setuju/ Kurang sesuai
- 2 = Cukup jelas / Cukup Baik/ Kadang-kadang/Ragu-Ragu/ Cukup Sesuai
- 3 = Jelas /Baik/ Sering /Setuju/Sesuai

Untuk menentukan nilai skoring dapat dilakukan dengan menghitung jumlah skor tertinggi dan terendah menurut Ichsan (2017), seperti :

Nilai tertinggi = Skor item tertinggi x total jumlah pertanyaan (3 x 12 = 36)
 Nilai terendah = Skor item terendah x total jumlah pertanyaan (1 x 12 = 12)

Variabel penilaian evaluasi kinerja keberlanjutan institusi Common-Pool Resources (CPRs) dianalisis secara deskriptif dibagi menjadi tiga kelompok menurut Ichsan (2017) adalah sebagai berikut :

- a. Kinerja kelembagaan tinggi bila memperoleh nilai total 28.01 – 36.00
- b. Kinerja kelembagaan sedang bila memperoleh nilai total 20.01 – 28.00
- c. Kinerja kelembagaan rendah bila memperoleh nilai total 12.00 – 20.00

Analisis data untuk tujuan kedua dan ketiga menggunakan Analisis SWOT. Menurut Kurniawan (2011) Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), tetapi pada saat yang sama dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Penentuan faktor-faktor strategis (eksternal dan internal) dari proses implementasi kemitraan kehutanan menggunakan analisis SWOT. Matriks ini dapat dengan jelas menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki (Khuzaini dan Suwitho, 2007) seperti matriks berikut ini:

Tabel 2. Matriks SWOT

	IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS			
	OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
	TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT

Sumber: (Rangkuti, 2019).

Menurut Rangkuti (2019), penyusunan rencana strategis pada suatu penelitian terdiri dari matrik faktor strategi eksternal, matrik faktor strategi internal.

a. Faktor Internal atau IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*)

Penilaian IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) menurut Rangkuti (2019) didasarkan pada hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada kolom 1.
2. Beri bobot pada masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi total 1,00)
3. Hitung rating (pada kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) di beri nilai mutu dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata industri atau pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif, kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industri, nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan perusahaan di bawah rata-rata industri, nilainya adalah 4.
4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*).
5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya. Skor total ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.

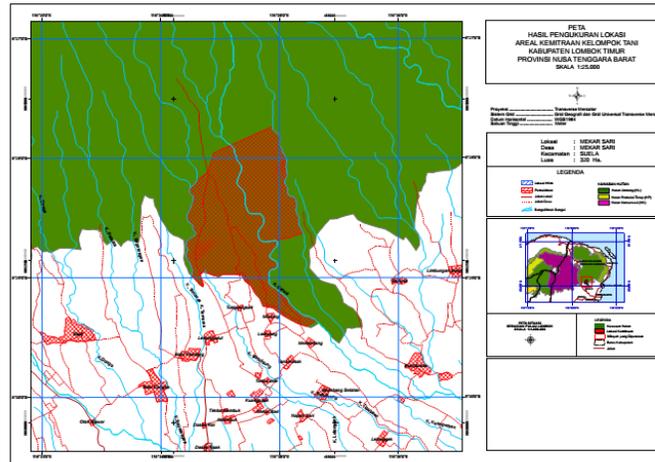
b. Faktor Eksternal atau EFAS (*External Faktor Analysis Summary*)

Penilaian faktor eksternal atau EFAS (*External Faktor Analysis Summary*) menurut Rangkuti (2019) didasarkan dari hasil perhitungan sebagaimana berikut:

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman pada kolom 1.
2. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis.
3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4.
4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*).
5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Skor total ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring merupakan gabungan dari tujuh kelompok tani hutan, diantaranya KTH Rindu Alam, KTH Tempos Sodot, KTH Urat Kelayu, KTH Batu Bedai, KTH Batu Kaoq, KTH Mudung dan KTH Makmur, didirikan pada tahun 2016. Luas hutan mitra saat ini adalah ± 320 ha dan digunakan untuk lahan garapan dengan tanaman tegakan dan tanaman dibawah tegakan.



Gambar 1. Peta Areal Kemitraan Kehutanan

a. Proses Implementasi Program Kemitraan

1. Prinsip Kejelasan Wilayah

Kejelasan batas wilayah dan pengelolaan kemitraan diatur dalam aturan konstitusional dan kolektif dalam bentuk naskah kesepahaman yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban lembaga dalam melaksanakan program (Azizah, *et al.*, 2020). Kejelasan batas wilayah pengelolaan dapat mengurangi peluang terjadinya konflik serta dapat meningkatkan komitmen terhadap aturan yang ditetapkan (Dietz, *et al.*, 2003).

Dalam prinsip ini, indikatornya adalah kejelasan batas fisik wilayah kemitraan. Batas-batas wilayah dan pengelolaan meliputi areal kegiatan yang berada di zona pemanfaatan dengan memberikan akses pemanfaatan HHBk kepada masyarakat. Luas wilayah lahan kemitraan sudah ditetapkan yaitu 320 hektar dan memiliki total anggota 513 orang. Luas lahan garapan untuk masing-masing kepala keluarga tidak lebih dari 2 hektar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2021 yang mengatur luas maksimum areal kemitraan kehutanan di wilayah kerja pengelola hutan adalah 5 (lima) hektar untuk setiap kepala keluarga.

2. Prinsip Kesesuaian

Prinsip kesesuaian merupakan prinsip penting dalam institusi CPRs. Dalam menilai prinsip kesesuaian Program Kemitraan Kehutanan dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

Kesesuaian distribusi biaya dan manfaat

Peraturan yang mengatur bagaimana manfaat dan biaya yang didistribusikan, diperlukan, diizinkan, atau dilarang di antara anggota mitra (Massiri, 2016). Prinsip kesesuaian biaya dan

manfaat merupakan syarat bagi ketahanan suatu organisasi. Sebagian besar anggota mitra menganggap bahwa manfaat sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. BKPH Rinjani Timur memberdayakan masyarakat untuk mengelola kawasan sebaik mungkin, dan antara masyarakat dengan BKPH Rinjani Timur telah menyepakati sistem bagi hasil dengan persentase pendapatan dan pengolahan HHBK setelah dikurangi biaya operasional. Berdasarkan NKK Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring dengan BKPH Rinjani Timur, KPH mendapatkan 20% dan masyarakat mendapatkan 80%. Partisipasi masyarakat dalam program ini merupakan aset bagi BKPH Rinjani Timur karena masyarakat turut membantu menjalankan program pemerintah, dalam hal ini program kemitraan kehutanan.

Kesesuaian aturan kemitraan kehutanan dengan kondisi ekonomi masyarakat

Berdasarkan sistem bagi hasil antara BKPH Rinjani Timur dengan masyarakat yang terlibat dalam program kemitraan kehutanan, diharapkan kondisi ekonomi masyarakat akan membaik karena dengan sistem bagi hasil ini, masyarakat akan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan akan mendapatkan persentase bagi hasil yang lebih tinggi. Menurut Permenhut No.83 Tahun 2016, dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dalam pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, perlu dilakukan kegiatan Perhutanan Sosial dalam hal ini Kemitraan Kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan.

Kesesuaian aturan pemanfaatan sumber daya untuk kebutuhan masyarakat

Pemanfaatan sumber daya telah diatur dalam Naskah Kerjasama Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring dengan BKPH Rinjani Timur, yang menyatakan bahwa pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu, aturan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016. Penggunaan sumber daya saat ini yang jumlahnya akan selalu berubah tergantung kepada kebutuhan atau keinginan manusia. Aspirasi masyarakat dipertimbangkan dan dihormati secara substansi dan kesamaan diambil untuk mencapai tujuan Program Kemitraan Kehutanan.

3. Prinsip Pengaturan Kolektif

Dalam penelitian ini, indikator yang menilai prinsip pengaturan kolektif adalah intensitas pertemuan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pertemuan. Saat ini masih sering diadakan pertemuan sebagai bagian dari Program Kemitraan Kehutanan. Rapat rutin biasanya diadakan seminggu sekali, tetapi jika ada kepentingan lain pertemuan dapat dilaksanakan lebih dari sekali dalam seminggu. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, dalam hal partisipasi pertemuan sebagian besar masyarakat terlibat dalam setiap pertemuan.

Dengan adanya intensitas pertemuan kelompok yang tinggi, maka akan berdampak pada tujuan program kemitraan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika prinsip pengaturan kolektif ini tidak berjalan maka tidak ada jaminan rancangan aturan kemitraan yang dijalankan itu dapat bertahan lama (Massiri, 2016). Tidak berjalannya prinsip ini menyebabkan hubungan pengelola dengan masyarakat dan institusi lokal menjadi kurang baik dan bahkan terjadi hubungan yang buruk.

Diperlukan peran ketua dalam mengkoordinir, memotivasi, bertanggung jawab dan menginspirasi anggota kelompok tani dalam meningkatkan partisipasi anggota anggota. Peran ketua kelompok tani dalam menggerakkan anggota kelompok tani sangat menentukan efektivitas kelompok dalam

mencapai tujuan. Maka dari itu perlu adanya koordinasi antara pengurus dengan anggota kelompok dalam hal tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga akan tercapai kelembagaan yang baik.

4. Prinsip Monitoring

Menurut Massiri (2016), Kinerja tidak hanya bergantung pada kesepakatan pemilihan bersama, tetapi juga bagaimana mengontrol dan menegakkan aturan yang telah ditetapkan. Banyak lembaga bertahan dengan biaya pemantauan yang rendah. Aturan mengenai proses pemantauan pelaksanaan kemitraan kehutanan telah diatur dan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).

Dalam pelaksanaannya, pemantauan dilakukan secara aktif dan berkala oleh lembaga lokal, dalam hal ini BKPH Rinjani Timur atau Dinas LHK NTB bersama dengan Gapoktan selalu memantau setiap kegiatan yang dilakukan agar masing-masing pihak yang terlibat dalam program kemitraan kehutanan memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik. Pelaksanaan kemitraan ini akan dimonitor setiap tahun dan dievaluasi setiap lima tahun. Pemantauan secara berkala dapat meningkatkan kondisi hutan. Ostrom (2000) dalam Masisiri (2018) juga mengungkapkan bahwa hanya sedikit sistem sumberdaya yang dapat bertahan lama tanpa proses monitoring.

5. Prinsip Penerapan Sanksi

Untuk mencegah masyarakat melanggar aturan, diperlukan penerapan sanksi. Sanksi bagi pelanggar harus lebih mahal daripada manfaat yang diperoleh oleh pihak yang melanggar (Ostrom, 2009 dalam Massiri, 2016). Menerapkan aturan main tanpa menjatuhkan sanksi membuat institusi menjadi tidak berguna, pentingnya penerapan sanksi yang lebih memberatkan bagi yang melanggar, agar biaya pelanggaran lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh (Massiri, 2016).

Dalam aturan pelaksanaan Program Kemitraan Kehutanan, apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan ini, akan diberikan sanksi berupa teguran dan peringatan tertulis kepada pihak yang melanggar, pihak yang memberikan sanksi yaitu Dinas LHK NTB. Prinsip penerapan sanksi dilatarbelakangi oleh kepentingan bersama yaitu motivasi yang sangat tinggi untuk perlindungan dan keamanan seperti kebutuhan untuk menghindari banjir, kebutuhan menjaga sumber air dan kebutuhan terhindari dari erosi dan longsor (Massiri, 2016).

6. Prinsip Pengakuan Hak

Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) mengatur tentang hak-hak masyarakat dalam kegiatan Program Kemitraan Kehutanan, termasuk pemanfaatan HHK dan HHBK di kawasan kemitraan kehutanan yang disepakati untuk memperoleh bagi hasil, mendapatkan pelatihan dan pembekalan tata usaha serta mendapatkan pembinaan pengembangan industri pengolahan HHBK dan HHK, dan mendapatkan pelatihan tata kelola, pengelolaan dan konsultasi teknis kawasan hutan, memperoleh bimbingan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pemasaran hasil pengelolaan hutan, serta memperoleh dukungan modal, sarana dan prasarana produksi. Hak tersebut telah mendapat pengakuan keputusan yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah.

Prinsip pengakuan hak dalam pengelolaan sumberdaya sudah dilaksanakan karena pihak BKPH Rinjani Timur mengakui hak masyarakat lokal untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya secara internal di Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Nursidah *et al* (2012) hasil penelitian pada model pengelolaan Hutan Ulayat menyatakan bahwa setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam mengatur sumberdaya.

7. Keterkaitan Sistem Pengelolaan

Prinsip keterkaitan dengan sistem pengelolaan sudah terwujud pada Program Kemitraan Kehutanan Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring sebagai bagian institusi dari pengelolaan KPH Rinjani Timur. Prinsip ini akan terwujud setelah prinsip desain Ostrom lainnya telah terpenuhi (Massiri, 2016). Dalam prinsip ini, indikatornya adalah keterkaitan aturan pada level operasional, level kolektif, dan level konstitusional. Berdasarkan penelitian ini terlihat adanya hubungan antara aturan pada level operasional, level kolektif, dan level konstitusional.

Tabel 3. Hasil Penilaian Keberlanjutan Kelembagaan Program Kemitraan Kehutanan

Variabel	Indikator Penilaian	Nilai rata-rata KTH
Kejelasan batas-batas wilayah	Kejelasan Wilayah lahan kemitraan	2,61
	Kesesuaian	
	Kesesuaian distribusi biaya dan manfaat	2,49
	Kesesuaian aturan kemitraan dengan kondisi ekonomi masyarakat	2,49
	Kesesuaian aturan pemanfaatan sumberdaya dengan kebutuhan masyarakat	2,59
Pengaturan	Intensitas pertemuan	2,77
	Partisipasi masyarakat dalam setiap pertemuan	2,51
Monitoring	Proses monitoring dilakukan secara aktif oleh lembaga lokal	2,51
	Proses monitoring dilakukan secara efektif oleh masyarakat setempat	2,85
Penerapan sanksi	Mekanisme sanksi adat dapat ditegakkan kepada pihak yang melanggar	2,70
Pengakuan hak dalam mengatur	Hak masyarakat dalam program kemitraan mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah	2,72
Keterkaitan sistem	Keterkaitan antara aturan program kemitraan pada level operasional, kolektif, dan konstitusional	2,86
Total nilai		29,11

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2022

b. Identifikasi Dan Analisis Faktor Internal Menggunakan Matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*)

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan (Nisak, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kekuatan dan kelemahan pada pelaksanaan program kemitraan kehutanan. Faktor-faktor tersebut kemudian digunakan matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dengan pembobotan dan pemberian rating untuk mencari skor masing-masing. Nilai, bobot dan rating ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks IFAS

Kategori	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan	- Dukungan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap program kemitraan	0,39	4	1,56
	- Keterlibatan <i>stakeholder</i>	0,32	3	0,96
	- Terbentuknya kelembagaan yang kuat	0,28	3	0,84
Jumlah				3,36
Kelemahan	- Sumber daya manusia yang masih rendah	0,32	2	0,64
	- Modal	0,29	3	0,87
	- Kurangnya penyuluhan	0,38	1	0,38
Jumlah				1,89
Total Skor				5,25

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas total skor matriks IFAS yang diperoleh adalah 5,25. Dan berdasarkan teori matriks IFAS, skor total yang lebih tinggi dari 2,5 menunjukkan bahwa Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring memiliki keunggulan internal yang kuat dan dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan yang ada (Makkarenu *et al.*, 2019).

c. Identifikasi dan analisis faktor eksternal menggunakan matriks EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*)

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Dimana faktor ini terkait dengan kondisi yang terjadi di luar perusahaan dan mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan (Nisak, 2014). Berdasarkan kajian faktor eksternal, peluang dan ancaman yang diperoleh selama pelaksanaan program kemitraan kehutanan. Kemudian gunakan matriks EFAS (*External Factor Analysis Summary*) dengan pembobotan dan pemberian rating untuk mencari skor untuk setiap faktor. Nilai bobot dan rating ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks EFAS

Kategori	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang	1. Pengembangan ekonomi kreatif	0,34	3	1,02
	2. Peningkatan kerjasama atau relasi dengan pihak lain	0,29	2	0,58
	3. Adanya dukungan dari pemerintah	0,36	3	1,08
Jumlah				2,68
Ancaman	1. Dinamika perubahan kebijakan	0,27	2	0,54
	2. Fluktuasi harga pasar	0,33	2	0,66
	3. Adanya pihak yang kontra	0,40	1	0,40
Jumlah				1,60
Total Skor				4,28

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Dapat dilihat pada tabel di atas, total skor matriks EFAS yang diperoleh adalah 4,28. Berdasarkan teori matriks EFAS, skor total 2,5 atau lebih menunjukkan bahwa Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring memiliki keunggulan yang besar, yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan yang ada. Peluang yang sangat baik untuk mengatasi ancaman yang ada (Makkarenu *et al.*, 2019).

d. Strategi Analisis SWOT

Matriks SWOT merupakan tahap akhir yang dilakukan setelah menentukan faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Menurut Rangkuti (2019), matriks SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan agar dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Hasil penentuan matriks SWOT dalam pengelolaan kemitraan kehutanan Gapoktan Puncak Semaring dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks SWOT

Faktor Internal	STRENGTH (S) / KEKUATAN	WEAKNESSES (W) / KELEMAHAN
Faktor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap program kemitraan - Keterlibatan <i>stakeholder</i> - Terbentuknya kelembagaan yang kuat 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia yang masih rendah - Modal - Kurangnya penyuluhan
OPPORTUNITIES (O) /PELUANG	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan ekonomi kreatif - Peningkatan kerjasama atau relasi dengan pihak lain - Adanya dukungan dari pemerintah 	<p>Mengoptimalkan program kemitraan guna mempertahankan dan meningkatkan keragaman jenis potensi sumberdaya yang ada untuk untuk dikelola dengan maksimal agar hasil yang diperoleh lebih optimal</p> <p>SO = 1,56 + 1,08 = 2,64</p>	<p>Meningkatkan kemampuan SDM dan menjalin kerjasama lebih intensif dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan sistem pemasaran dari produk yang dihasilkan dalam program kemitraan kehutanan</p> <p>WO = 0,87 + 1,08 = 1,95</p>
TREATHS (T) /ANCAMAN	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ul style="list-style-type: none"> - Dinamika perubahan kebijkana - Fluktuasi harga - Adanya pihak-pihak yang kontra 	<p>Membenahi sistem kelembagaan dan meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak sehingga dapat mengambil suatu keputusan demi keberlanjutan program kemitraan kehutanan</p> <p>ST = 1,56 + 0,66 = 2,22</p>	<p>Mengadakan penyuluhan dan pelatihan guna mengoptimalkan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam program kemitraan kehutanan</p> <p>WT = 0,87 + 0,66 = 1,53</p>

Sumber: Data Primer diolah tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil analisis menunjukan nilai tertinggi dari matriks swot adalah strategi S-O sebesar 2,64. Dimana strategi S-O merupakan strategi yang dibuat berdasarkan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mendapatkan dan

memanfaatkan peluang sebesar besarnya (Rangkuti, 2019). Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan kemitraan kehutanan Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring yaitu dengan mengoptimalkan program kemitraan guna mempertahankan dan meningkatkan keragaman jenis potensi sumberdaya yang ada untuk dikelola dengan maksimal agar hasil yang diperoleh lebih optimal.

Selain itu untuk strategi yang berada pada urutan kedua adalah strategi S-T yang merupakan strategi yang dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang mungkin akan muncul (Rangkuti, 2019). Strategi ini memiliki total nilai 2,22, dimana strategi yang dapat dilakukan adalah membenahi sistem kelembagaan dan meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak sehingga dapat mengambil suatu keputusan demi keberlanjutan program kemitraan kehutanan.

Selanjutnya adalah strategi yang berada di urutan ketiga merupakan strategi W-O dengan jumlah nilai sebanyak 1,95. Strategi ini merupakan strategi untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang dimiliki (Rangkuti, 2019). Pada strategi ini dapat diterapkan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan menjalin kerjasama lebih intensif dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan sistem pemasaran dari produk yang dihasilkan dalam program kemitraan kehutanan

Strategi dengan nilai terendah adalah strategi W-T dengan nilai 1,53. Dimana strategi W-T merupakan strategi yang dilakukan dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari terjadinya ancaman (Rangkuti, 2019). Dalam hal ini strategi yang digunakan yaitu Mengadakan penyuluhan dan pelatihan guna mengoptimalkan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam program kemitraan kehutanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses implementasi kemitraan kehutanan antara Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring dengan BKPH Rinjani Timur masuk ke dalam kriteria tinggi dengan nilai 29,11. Faktor pendukung kemitraan kehutanan antara Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring dengan BKPH Rinjani Timur antara lain dukungan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap program kemitraan, keterlibatan *stakeholders* sebagai pendamping dalam program Kemitraan Kehutanan Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring, dan terjadinya penguatan kelembagaan di Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring dan BKPH Rinjani Timur. Sedangkan faktor penghambat kemitraan kehutanan antara lain sumber daya manusia dari anggota Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring yang masih rendah, kurangnya modal anggota Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring untuk mengelola dan mengembangkan lahan garapannya dan kurangnya penyuluhan. Strategi pengelolaan kemitraan kehutanan antara Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring dengan BKPH Rinjani Timur ditentukan dengan menggunakan strategi S-O (*Strength- Opportunities*) yaitu mengoptimalkan program kemitraan guna mempertahankan dan meningkatkan potensi sumberdaya untuk dikelola dengan maksimal.

Saran yang diberikan pada penelitian ini sebagai berikut; program kemitraan kehutanan BKPH Rinjani Timur dengan Gabungan Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring harus lebih siap demi keberhasilan program tersebut. Persiapan tersebut meliputi kesiapan pihak BKPH Rinjani Timur sebagai pengelola kawasan dan masyarakat sebagai mitra usaha yang bekerja di lapangan. Kapasitas sumberdaya masyarakat mitra perlu diperkuat, sehingga diperlukan dukungan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat mitra dalam kegiatan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif. Dan diharapkan akan dilakukan studi lebih lanjut mengenai kontribusi program

kemitraan kehutanan terhadap pendapatan atau perekonomian masyarakat serta keberlanjutan program kemitraan kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, D. Dan Parjaman, T. 2019. Pendekatan Penelitian Kombinasi: Sebagai “Jalan Tengah” Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* vol 5, No 4.
- Azizah, L., Ichsan, A, C dan Webliana, K. 2021. Analisis Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Waku Lani Desa Lenek Duren Dan Desa Toya Lombok Timur. *Jurnal Sylva Scientiae* Vol. 04 No. 1.
- Dietz, T., Ostrom, E., Stern, C., 2003. *The Struggle to Govern the Commons*. *Science* Vol 302.
- Ichsan, A, C. 2017. Kelembagaan Model Desa Konservasi Di Taman Nasional Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Ichsan, A. C., Markum, & Silamon, R. F. 2019. *Policy performance analysis of Aikbual village regulation number 1 2014 concerning biodiversity management to supporting social forestry in West Nusa Tenggara*. *Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)*. Vol. 14, No. 2.
- Khuzaini dan Suwitho. 2007. Analisis Swot Daya Dukung Daerah Terhadap Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Blitar.
- Kurniawan, A. 2011. Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan Kph Telawa (Studi Kasus Di Lmdh Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari Dan Yosowono). [Skripsi]. Universitas Negeri Semarang.
- Makkarennu, Astuti. T, Ridwan. 2019. Strategi Pengembangan Usaha pada Industri Kayu Gergajian Melalui Pendekatan SWOT dan analisis IFAS-EFAS (*Business Development Strategy in Sawn Timber Industry Through the SWOT Approach and IFAS-EFAS Analysis*). *Jurnal Ilmu Teknologi Kayu Tropis* Vol. 17 No. 1.
- Massiri, Sudirman, DG. 2016. Keberlanjutan Institusi Kesepakatan Konservasi Masyarakat Di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Mutmainah, R., dan Sumardjo. 2014. Peran kepemimpinan kelompok tani dan efektivitas pemberdayaan petani. *J. Sosiologi Pedesaan*. 2 (3): 182-199.
- Nisak, Z. 2014. Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif.
- Nursidah, Nugroho, B., Darusman, D., Rusdiana, O., Rasyi, Y. 2012. Pengembangan Institusi untuk Membangun Aksi Kolektif Lokal dalam Pengelolaan Hutan Kawasan Lindung SWP DAS Arau, Sumatera Barat. *JMHT* Vol. XVIII, (1): 18–30.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Rangkuti, F. 2019. *ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gamedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Utami, R. P., dan Ratnaningsih, Y. 2018. Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Dengan BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura. *Jurnal Silva Samalas*. Volume1, No.1 Hal: 38.
- Wahanisa, R. 2015. *Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. *Yustisia*. Vol. 4 No. 2.
- Yusra, I., Hadya, R., dan Fernandes, J. 2017. *Likuiditas, Financial Leverage, Dan Prediktabilitas Beta: Pendekatan Fowler And Rorke* Sebagai Metode Koreksi Beta. *Jurnal Beneflta* 2 (1) hal; 84.